

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL

Dia Ayu Pertiwi

Dayupertiwi411@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and area on Capital Expenditure of districts/cities in East Java Province during 2014-2018. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 148 financial statements from 38 districts/cities in East Java province during 2014-2018, which were taken from the Audit Board as the sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple Linear regression with SPSS 22. The research result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on Capital expenditure. This meant, the higher the revenue was, the increase the Capital expenditure would be. Likewise, the General Allocation Fund had a positive effect on Capital expenditure. It meant, the more the Fund increased, the more the Capital expenditure would be. Similarly, the area had a positive effect on Capital expenditure. In other words, the wider the are of districts/cities was, the more facilities which needed to be fulfilled by the government in order to have good public services.

Keyword: PAD, DAU, LW, BM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposivesampling* dengan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan metode *purposive sampling* didapatkan hasil sebanyak 148 laporan keuangan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur dengan periode observasi 2014-2018 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya apabila pendapatan asli daerah tinggi maka belanja modal akan meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya apabila dana alokasi umum meningkat maka belanja modal juga meningkat. Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Kata Kunci: PAD, DAU, LW, BM

PENDAHULUAN

Reformasi sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu pada bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan. Pada tahun 1998 pemerintah telah membuat suatu reformasi dalam bentuk perubahan politik dan administrasi, reformasi tersebut merupakan perubahan bentuk suatu pemerintahan yang telah tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan kemudian diubah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 hingga sekarang. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dalam rangka menitik beratkan

daerah kabupaten dan kota dengan ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah menegaskan kewenangan untuk alokasi sumber daya yang dimiliki untuk anggaran belanja daerah sesuai asas kemampuan daerah, kepatuhan, dan kebutuhan yang tercantum dalam anggaran daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran guna memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya lebih dari satu periode akuntansi dan lebih dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya, aset tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari dan tidak untuk diperjual belikan. Aset tetap yang dimiliki dari hasil belanja modal adalah syarat utama guna memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana demi kelancaran tugas pemerintah dan fasilitas publik. Belanja modal diantaranya: (1) Belanja Modal Tanah yaitu segala bentuk transaksi yang digunakan untuk pembelanjaan, penebusan, pengadaan atau pengurusan baik penimbun ataupun proses peralihan, pemerataan, pematangan tanah, dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan administratif mengenai hak dan kewajiban atas tanah pada waktu pembayaran/pembebasan ganti rugi hingga siap digunakan. (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pembiayaan untuk pembelian peralatan dan mesin yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan seperti pembelian, biaya instalasi, pengangkutan ataupun biaya langsung lainnya guna mendapattkan perlengkapan dan alat bantu yang siap digunakan. (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pembiayaan guna mendapatkan properti dan konstruksi untuk mendapatkan aset sehingga penggunaannya dapat mencakup estimasi pengeluaran ataupun biaya konstruksi, termasuk jasa notaris, penanganan Ijin Mendirikan Bangunan, serta Pajak. (4) Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Saluran yaitu anggaran yang digunakan sebagai pembiayaan akses transportasi, irigrasi dan saluran sehingga dapat mencakup pengeluaran lain-lain ataupun perbaikan konstruksi yang siap digunakan. (5) belanja Modal Fisik Lainnya pengeluaran yang secara terpisah tidak bisa dikelompokkan dengan transaksi lainnya,. Anggaran belanja modal diukur berdasar kebutuhan daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas publik. Seperti yang telah diungkapkan Tolu *et al.* (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kota Bitung. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) menunjukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dana akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan (Halim, 2004:72). Dalam hal ini masuk kedalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Belanja modal memiliki ciri-ciri yaitu berwujud, sifatnya menambah, memiliki manfaat yang lebih dari satu periode dan nilainya relatif material. Belanja modal memiliki ciri-ciri yaitu berwujud, sifatnya menambah, memiliki manfaat yang lebih dari satu periode dan nilainya relatif material. Sistem pengeluaran biaya disetiap daerah perlu diatur dan di rencanakan dengan cara melakukan pemantauan atau pengawasan dan pengecekan pada daerah masing-masing sehingga terwujud perekonomian yang kondusif. Alokasi belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktifitas-aktifitas yang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Pengalokasian setiap pengeluaran yang digunakan untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan umum merupakan hal yang diutamakan demi tercipta perekonomian yang stabil, efektif dan efisien. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan sarana publik yang lebih memadai dengan adanya pembangunan infrastruktur. Daerah yang tidak

memiliki potensi sumber daya dalam hal sumber keuangan atau dana yang melimpah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya (Tuasikal, 2008). Menurut Sholikhah dan Wahyudin (2014) untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah menjadi lebih diarahkan pada belanja modal. Karena belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: (1) Apakah pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (3) Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal? Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) Untuk menganalisis pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Bastian (2006) menyebutkan beberapa hal penting yang termasuk dalam undang-undang otonomi daerah antara lain: (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, baik dibiayai dari dan atas beban APBD maupun dari dan atas beban APBD. (2) Sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (3) Persentase dana perimbangan, salah satu bagian dana perimbangan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Harun (2009) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik, efektif, dan efisien kinerja pemerintah daerah dengan adanya otonomi dalam melayani kepentingan publik, pemerintah daerah mendapat pelimpahan wewenang, pembagian pajak, pendapatan, beban dan pembagian personil dari sistem desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas maupun plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas maupun plafon anggaran kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yutikasari, 2007).

Belanja Modal (BML)

Menurut Halim (2004), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau

inventaris yang memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: (1) Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis Pendapatan Pajak untuk provinsi meliputi Objek Pendapatan berikut: a) Pajak Kendaraan Bermotor, b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, c) Pajak Kendaraan di Atas Air, d) Pajak Air di Bawah Tanah, e) Pajak Air Permukaan, f) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, g) Pajak Parkir. (2) Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Darise (2008), fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil.

Luas Wilayah (LWH)

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah.

Penelitian Terdahulu

Pertama, menurut Mentayani dan Rusmanto (2013) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kotadan kabupaten di Pulau Kalimantan.

Kedua, menurut Tolu *et al.*, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung)”. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari analisis tersebut adalah Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota Bitung.

Ketiga, menurut Febriana (2015) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dipilih secara

purposive sumpling. Data penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur.

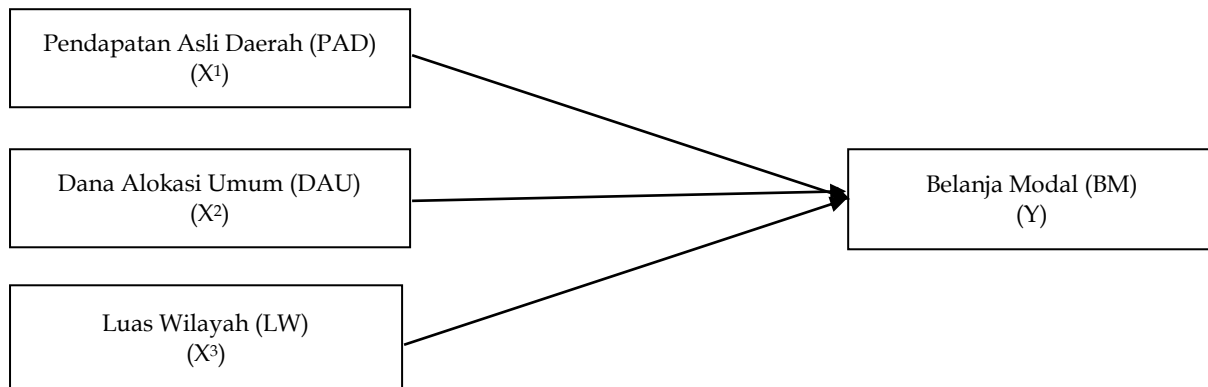
Keempat, menurut Permatasari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Jawa Timur”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Tahun penelitian yang digunakan mulai tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Jawa Timur.

Kelima, menurut Susanti dan Fahlevi (2016) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 23 kabupaten/kota di wilayah Aceh. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

Keenam, menurut Tuasikal (2008) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Ketujuh, menurut Sholikhah dan Wahyudin (2014) pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa”. Sample pada penelitian ini berjumlah 93 kabupaten/kota di Jawa pada tahun 2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya agar kebutuhan dan kesejahteraan daerah dapat terpenuhi (Febriana, 2015). Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal yaitu Tuasikal (2008), Susanti dan Fahlevi (2016), Febriana (2015) dan Permatasari (2016). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat

tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri begitu juga sebaliknya (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal yaitu Tuasikal (2008), Susanti dan Fahlevi (2016), Febriana (2015) dan Permatasari (2016). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014), luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Daerah dengan wilayah yang lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Penelitian tentang pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan Luas Wilayah (LWH) berpengaruh terhadap Belanja Modal yaitu Sholikhah dan Wahyudin (2014), dan Kusnandar dan Siswanto (2012). Dengan demikian hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah:

H₃: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2008:8). Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008:8). Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur, menggunakan laporan realisasi anggaran pada tahun 2014-2018. Metode penelitian ini termasuk metode deskriptif yaitu kejadian yang terjadi pada masa sekarang untuk diteliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sebagian dari populasi (Sugiyono, 2008). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* untuk mengambil sampel dari populasi

berdasarkan kriteria tertentu. Merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 4 tahun berturut-turut pada periode tahun 2014-2018. (2) Laporan Realisasi APBD yang sudah di audit oleh BPK secara lengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Secondary Data*). Sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung atau dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat oleh peneliti dan diolah lebih lanjut. Seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2014-2018. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah keterangan tertulis yang dimiliki oleh instansi, sesuai dengan penelitian ini maka instansinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sekaran (2006) variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai. Dalam penelitian ini digunakan dua macam variable penelitian: (1) Variabel Bebas (*Independent Variable*), Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Luas Wilayah (LWH). (2) Variabel Terikat (*Dependent Variable*), Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (BML).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian (2001) DAU adalah dana berasal dari APBN, yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya, DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Febriana, 2015).

Luas Wilayah (LWH)

Luas wilayah daerah merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal. Luas wilayah daerah diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut. Luas Wilayah ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Fatmawati, 2013). Dalam penelitian ini data luas wilayah diperoleh dari www.kemendagri.go.id Provinsi Jawa Timur.

Belanja Modal (BML)

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi

umum. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Pengukuran yang digunakan adalah rata-rata (*mean*) yaitu untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan, standar deviasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata, maksimum yaitu untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, minimum yaitu untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Untuk menghindari ketidak validan data, maka data yang digunakan harus mempunyai distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan metode *normal probability plot* adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Menurut Ghozali (2016:154) distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2016:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Multikolinieritas adalah adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam persamaan regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Kedua ukuran tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi jika *Tolerance* > 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) < 10.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan meliputi: (1) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif, (b) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. (c) Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Dapat dikatakan model regresi baik jika tidak terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Dasar analisis yaitu: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:94). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang berhubungan dengan empat variabel bebas sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Dengan rumus:

$$BML = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_4 LWH + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan menggunakan R^2 adalah untuk mengukur seberapa besar variable bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dimiliki yaitu antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan bahwa pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan pengaruh variable bebas terhadap variable terikat lemah.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit*)

Uji kelayakan model (*Goodness of fit*) atau dikenal dengan uji F. uji model/ uji anova digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Dapat diketahui dengan tingkat signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kesesuaian model ini dapat diketahui dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Atau dapat dilihat pada kolom signifikansi pada Anova. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima.

Pengujian secara parsial (uji t)

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variable independen mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. (2) jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif di gunakan untuk menggambarkan distribusi data di antaranya rata rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari sampel

yang telah di teliti. maka hasil perhitungan SPSS tentang analisis statisti deskriptif di sajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	38	10257	97805	40374,63	32129,901
DAU	38	13069	67586	43899,55	12888,886
LW	38	10010	79200	26932,37	20375,825
BML	38	11020	122058	26314,68	19115,528
Valid N (listwise)	38				

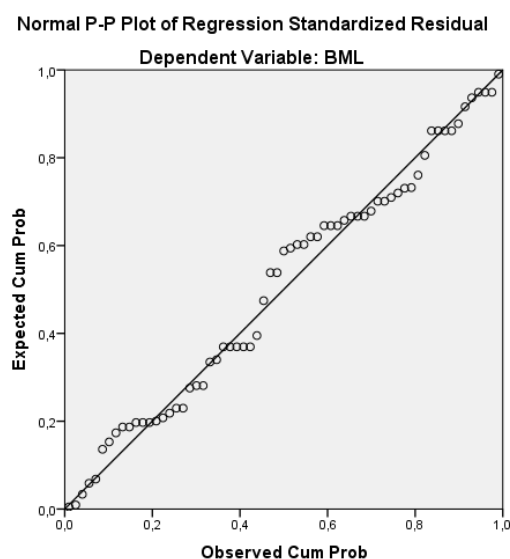
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat 38 sampel data yang di gunakan dengan rincian variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 10.257 dan nilai maksimum sebesar 97,805. Selain itu dari data Pendapatan Asli Daerah yang telah di peroleh selama 4 (empat) tahun, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 40374,63 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 32129,901. (2) Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa hasil pengolahan data Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun memiliki nilai minimum sebesar 13069, nilai maksimum sebesar 67586. Data pada tabel 3 juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) yang di miliki sebesar 43899,55 dengan standar deviasi sebesar 12888,886. Hal ini pun menunjukkan adanya progres yang cukup baik (3) Luas Wilayah hasil dari nilai rata-rata (mean) Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 26932,37 dengan nilai minimum sebesar 10010 nilai maksimum 79200 dan nilai standar deviasi sebesar 20375,825. Luas Wilayah menunjukkan bahwa distribusi data masih cenderung normal. (4) Belanja Modal. bahwa hasil pengolahan data Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun memiliki nilai minimum sebesar 11020 nilai maksimum 122058 nilai rata-rata (mean) 26314,68 dan nilai standar deviasi sebesar 19115,528.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel yang di gunakan mempunyai distribusi normal atau tidak normal.



Gambar 2

Grafik Normalitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Gambar 2 dapat di lihat bahwa grafik normal Probability Plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyeberan titik-titiknya mengikuti garis diagonal tersebut. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Hasil ini dapat di perkuat dengan menggunakan pengujian statistik yakni Uji Sampel *Test Kolmogorov-Smirnov* yang memiliki nilai signifikansi Uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

Tabel 2
Uji Normalitas Pendekatan Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	38
Kolmogorov-Smirnov Z	.787
Asymp. Sig. (2-tailed)	.566

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 2, dapat di lihat bahwa N = 38 memiliki nilai signifikansinya sebesar 0.566 (dimana tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05) maka dapat di simpulkan bahwa residual benar memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini menunjukkan hasilnya konsisten dengan uji grafik Normal Probability Plot sebelumnya, sehingga model regresi ini benar memenuhi Uji Normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini di gunakan untuk menguji apakah dalam model regresi di temukan ada atau tidaknya kolerasi antara variabel independen. Berikut hasil dari Uji Multikolinearitas:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0,997	1,003
DAU	0,988	1,012
LW	0,989	1,012

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat di lihat bahwa hasil perhitungan seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 1 (mendekati 1) dan juga nilai VIF < 10 (mendekati 10). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa model regresi ini tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi variabel antara periode tertentu dengan periode sebelumnya. Berikut hasil nilai uji Durbin Watson pada model regresi:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.452

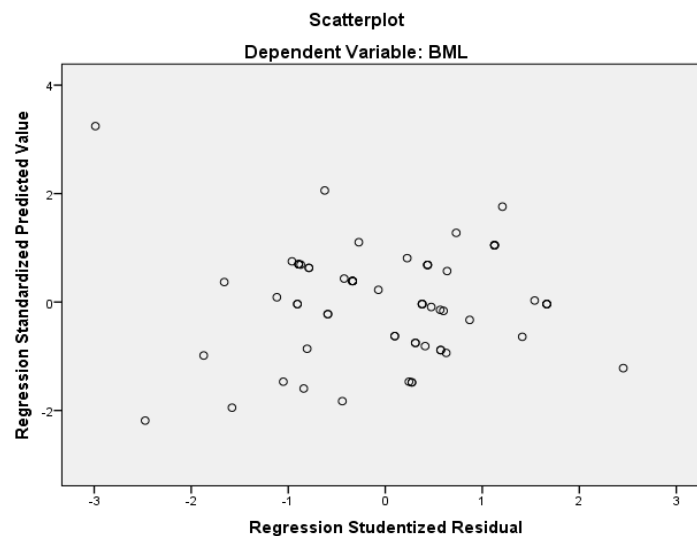
a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, LW

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat di ketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,452 terletak antara -2 sampai +2 yang berarti hasil dari model regresi ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pada Gambar 3, grafik plot di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada adanya atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Berikut hasil penelitiannya:

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	8778,919	11161,319		
PAD	0,475	0,090	0,295	1,946
DAU	0,562	0,226	0,379	2,491
LW	0,525	1,428	0,003	1,417

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan persamaan regresi linier berganda adalah:

$$BM = 8778,919 + 0,475PAD + 0,562 DAU + 0,525 LW + e$$

Berdasarkan hasil; diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konstanta (α) Pada persamaan regresi linier berganda nilai konstanta yang dimiliki sebesar 8778,919. Menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah bernilai 0, maka variabel dependen yaitu Belanja Modal sebesar 8778,919. (2) Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,475. karena koefisien bertanda positif maka menunjukkan adanya hubungan yang searah antar variabel PAD dengan variabel BM. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah semakin baik, maka akan meningkatkan Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. (3) Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,562, karena koefisien bertanda positif maka menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel DAU dengan variabel BM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik, maka akan meningkatkan Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. (4) Nilai koefisien regresi LW sebesar 0,525. karena koefisien bertanda positif maka menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel LW dengan variabel BM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman standar akuntansi pemerintahan semakin baik, maka akan meningkatkan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut hasil perhitungan nilai Koefisien Determinasi yang di peroleh:

Tabel 6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 ^a	,522	,653	17593,119

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil Koefisien Determinasi dari nilai adjusted R^2 sebesar 0,522, yang berarti 52,2% variasi perubahan dalam variabel dependen (Belanja Modal) dapat di jelaskan oleh pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah), sedangkan sisanya sebesar 47,8% di pengaruhi oleh faktor lainnya. Karena nilai Koefisien Determinasi mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau yang biasa di sebut Uji ANOVA ini di gunakan untuk menguji apakah model regresi layak di gunakan atau tidak layak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (nilai signifikansi Uji F < 0,05). Dari hasil pengujian model regresi telah di peroleh nilai F sebagai berikut:

Tabel 7
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2996319567,501	3	998773189,167	33,227	,004 ^b
Residual	10523606686,709	34	309517843,727		
Total	13519926254,211	37			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, LW

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7, hasil regresi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 33,227 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian t digunakan guna menguji koefisien regresi secara parsial apakah terdapat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$ (nilai signifikansi Uji t < 0,05). Hasil dari pengujian Uji t sebagai berikut:

Tabel 8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8778,919	11161,319		0,787	0,437
PAD	0,475	0,090	0,295	1,946	0,006
DAU	0,562	0,226	0,379	2,491	0,008
LW	0,525	1,428	0,003	1,417	0,009

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, karena Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi 0,006 yang memiliki arti kurang dari 0,05 dan hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, karena Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi 0,008 yang memiliki arti kurang dari 0,05 dan hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, karena Luas Wilayah memiliki nilai signifikansi 0,009 yang memiliki arti kurang dari 0,05 dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,475 dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Maka H_1 diterima, yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang artinya bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah dimana semakin tinggi pendapat asli daerah maka semakin tinggi juga belanja modal daerahnya. Selain itu, kenaikan pendapatan asli daerah disertai dengan kenaikan belanja daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pajak dan retribusi daerah telah dikembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan infrastruktur dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah daerah

sangat penting karena Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah.

Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan untuk tujuan pembangunan di daerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya PAD akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Febriana, 2015). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Febriana (2015), Permatasari (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Tuasikal (2008), Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan daerah. Serta melaksanakan jalannya pemerintahan melalui belanja daerah yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,562 dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Maka H_2 diterima yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum akan meningkatkan belanja daerah karena dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang berbentuk *block grants* yang berarti pemerintah daerah memiliki leluasaan dalam penggunaannya tidak terikat dalam kriteria tertentu, dana alokasi umum diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan pusat agar pemerintahan daerah dapat membiayai urusan pemerintahannya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan Belanja Modal, karena dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan prasaranan. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diterima maka belanja modal juga akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Febriana (2015), Permatasari (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Tuasikal (2008) dan Tolu *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pengalokasian dana alokasi umum diberikan

tidak terjadi kesimpangan fiskal dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan daerah guna memberikan pelayanan publik. Hal ini dapat tercipta melalui pengalokasian belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa luas wilayah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,525 dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Maka H_3 diterima, yang berarti bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, luas wilayah daerah merupakan faktor utama dalam mengetahui jumlah belanja modal daerah tersebut dan fasilitas apa aja yang berada di daerah tersebut dikarenakan luas suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada rakyat. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya akan lebih banyak memiliki belanja modal sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Fatmawati, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya luas wilayah suatu daerah dapat menentukan jumlah belanja modal daerah selain itu juga bersumber dari pajak dan sumber daya alam juga meningkat. Hal ini telah mendorong pemerintahan daerah dalam melakukan belanja yang lebih besar guna untuk mensejahterakan rakyatnya dan memenuhi kebutuhan daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada tahun 2014-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah menurun maka Belanja Modal juga akan menurun. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh daerah tersebut dapat mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga baik karena tingginya kontribusi daerah dalam hal pajak dan sumber daya alam yang akan dibagi hasilkan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat rendah maka dapat diartikan bahwa daerah belum optimal dalam mengelola pajak dan sumber daya alam yang dimilikinya. (2) Dana Alokasi Umum Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Modal juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika Dana Alokasi Umum menurun maka Belanja Modal juga akan menurun. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang di peroleh daerah dari pemerintah pusat maka dapat mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga baik karena tingginya kontribusi akan berdampak pada Dana Alokasi umum pada daerah tersebut, namun apabila Dana Alokasi Umum yang di peroleh kecil maka secara tidak langsung berdampak pada Belanja modal daerah tersebut. (3) Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya luas wilayah sebuah daerah pemerintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana

yang harus di sediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik, maka sebaliknya apabila kecilnya luas wilayah sebuah daerah pemerintah maka semakin sedikit pula sarana dan prasarana yang harus di sediakan guna untuk menunjang pelayanan publik yang kurang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: (1) Bagi pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. (2) Bagi pemerintah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencukupi, daerah akan lebih leluasa mengalokasikan Belanja Modal. (3) Bagi penelitian mendatang diharapkan meneliti daerah yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh akan lebih mencerminkan kondisi keseluruhan karena pada penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2014 - 2018 saja. (4) Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal. (5) Bagi penelitian berikutnya disarankan dapat menggunakan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Misalnya Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- . 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yutikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Gadjah Mada Jogjakarta*: 1-25.
- Fatmawati, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2(7): 1-19.
- Febriana, S. I. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-22.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Cetakan kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga* : 1-26.

- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusnandar dan Siswanto. 2012. Kusnandar dan Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1-17.
- Sekaran, U. 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sholikhah, I. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3(4): 553-562.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, S., dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1): 183-191.
- Tolu, A., E. N. Walewangko, S. Y. L. Tumangkeng. 2016. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2): 540-549.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1(2):142-155.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.